

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
PENGUNAAN INFORMASI
KEUANGAN DAERAH**
(Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

HIMMAH BANDARIY
NIM. C2C607068

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama Penyusun : HIMMAH BANDARIY
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607068
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
PENGUNAAN INFORMASI KEUANGAN
DAERAH**
(Studi pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 16 September 2011

Dosen Pembimbing,



(Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.)
NIP. 196601081992021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Himmah Bandariy

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607068

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 September 2011

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, SE., MSi., Akt

(.....)

2. Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt

(.....)

3. Drs. H. Idjang Soetikno, MM., Akt

(.....)

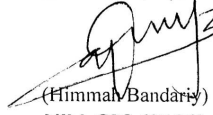
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Himmah Bandraiy, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 September 2011

Yang membuat pernyataan,



(Himmah Bandraiy)

NIM. C2C 607 068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan,
setelah kesulitan ada kemudahan” (QS: Al-insyirah 5-6)*

*“Hiduplah bagai lilin, dia rela berkorban demi untuk
menerangi sekitarnya.”*

*“Barang siapa ingin do’anya terkabul dan dibebaskan dari
kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan)
kesulitan orang lain.” (HR. Ahmad)*

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

*(Alm) Abah, mamah, Keluarga tercinta,
Saudara dan sahabat, Dan orang-orang
yang telah memberi kasih sayangnya
kepada penulis, Sehingga penulis dapat
menjalani hidup dengan lebih semangat,
optimis, berwarna dan bertujuan.*

ABSTRACT

This Research aims to empirically examine whether the accessibility of local financial reports and presentation of them influence the usefulness of local financial information by the stakeholders. Financial report have been seen as an important component that should be disclosed by local government since regional autonomy has been launched by the central government. As a consequence of him, the financial reports should be reported transparency and be accessible for stakeholders. This is because such reports are reflection of local government's commitment to fulfill the mandate of citizen and show implementation good governance in their local government.

This research was carried out in ex district residency Banyumas. The method used to collect data is through survey questionnaire of which the respondents were the members of local legislative council, Inspectorate, and Non Governmental Organization (NGO). By the purposive sampling method, fixed get sample from 180 members of local legislative council, 84 members of Inspectorate, and 40 members of NGO. Analysis method used in this research is multiple regression.

The result of hypothesis test showed that the presentation of local financial reports has a significant influence the enhancement of usefulness of local financial information by the stakeholders. And then accessibility of financial reports has a significant influence the enhancement of usefulness of local financial information by the stakeholders. Simultaneously, both the presentation accessibility of financial reports and influenced usefulness of local financial information.

Keywords: local financial reports, accessibility, local financial information.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna informasi. Laporan keuangan merupakan komponen penting yang harus diungkapkan oleh pemerintah daerah sejak otonomi daerah mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat. Dan sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandat dari masyarakat dan mewujudkan *good governance* di pemerintah daerah itu sendiri.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten wilayah Eks Karesidenan Banyumas dengan metode pengumpulan data melalui survey kuisisioner. Kuisisioner dalam penelitian ini ditujukan kepada para pengguna informasi laporan keuangan daerah di Kabupaten wilayah Eks Karesidenan Banyumas dengan responden dari anggota DPRD Kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, Inspektorat sebagai pengawas internal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan metode *purposive sampling*, kemudian ditentukan sampel sebanyak 180 anggota DPRD, 84 pegawai Inspektorat, dan 40 aktivis LSM. Pengujian menggunakan regresi linier berganda.

Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna informasi. Sementara aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Secara simultan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Kata kunci: laporan keuangan daerah, aksesibilitas, informasi keuangan daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonommi Universitas Diponegoro.
2. Bpk. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Akt selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang dengan sabar selalu memberi masukan, semangat dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota DPRD Se-Eks Karesidenan Banyumas periode 2009-2014, pegawai inspektorat Se-Eks Karesidenan Banyumas serta

kakak-kakak dari LSM wilayah Karesidenan Banyumas yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden pada penelitian ini.

4. Seluruh staf pengajar, pegawai TU, Petugas Administrasi regular II, Petugas parkir dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses kuliah di FE tercinta ini.
5. Keluarga tercinta: (Alm) Abah, mamah, kakak-kakak dan keluarga yang selalu mendo'akan penulis, memberi nasehat-nasehat yang membuat penulis lebih semangat.
6. Om darso dan keluarga, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya kepada penulis.
7. Mbak maal, mas miko, kak mimi, dan dek nayo, keluarga kecil yang selalu penulis repotkan, terima kasih untuk fasilitas nya selama ini. Hati-hati ya kalian di Sydney.
8. Ibu andri, terima kasih telah menjadi teman diskusi penulis, memberi masukan dan semangat kepada penulis.
9. Kakak tala dan kak yasin terima kasih untuk semua inspirasi, nasihat dan selalu bersedia menjadi psikolog gratis buat penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis, akuntansi reguler II angkatan 2007, zizah, desi, nina, mbak nita, tito cs, tia cs, ganesh cs, adit cs, diah cs, dion cs, riris cs, bondan cs, terima kasih atas bantuannya selama ini, tanpa kalian penulis tidak akan dapat mengerjakan tugas kuliah, dengan kalian ruang kelas menjadi bersahabat.

11. Deka, tiwi, kiki, puput, abhie, mumun, mas fahmi, dewi, ivan, nowo, andhi, dan sahabat FOSMA Jateng serta FOSMA Nasional lainnya, terima kasih atas do'a, semangat, inspirasi dan nasihatnya. Kalian adalah keluarga kedua penulis.
12. Keluarga besar ESQ Leadership Center Cabang Jateng-DIY, terima kasih atas do'a, semangat, inspirasi dan nasihatnya.
13. Sahabat-sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan menunggu selama penulis sidang, kak tala, kak fahmi, abi, kiki, tiwi, desi, zizah, mumun, ivan, terimakasih ya. I love you all.

Semarang, 15 September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14

2.1.1	Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	14
2.1.2	Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD).....	16
2.1.2.1	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
2.1.3	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	23
2.1.3.1	Laporan Realisasi Anggaran	25
2.1.3.2	Neraca Daerah	26
2.1.3.3	Laporan Arus Kas.....	28
2.1.3.4	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	30
2.1.4	Aksesibilitas Laporan Keuangan	31
2.2	Penelitian Terdahulu.....	33
2.3	Kerangka Pemikiran	40
2.3.1	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	41
2.3.2	Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	42
2.4	Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
3.1.1	Variabel terikat (<i>dependent variable</i>)	45
3.1.2	Variabel bebas (<i>independent variable</i>)	45
3.2	Populasi dan Sampel.....	47

3.3	Jenis dan Sumber Data	49
3.4	Metode Pengumpulan Data	49
3.5	Metode Analisis Data	51
3.5.1.	Tingkat Respon	51
3.5.2.	Analisis Statistik Deskriptif	51
3.5.3.	Uji Reliabilitas	52
3.5.4.	Uji Validitas.....	52
3.5.5.	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.5.5.1	Uji Multikolinieritas	53
3.5.5.2	Uji Autokorelasi	53
3.5.5.3	Uji Heteroskedastisitas	54
3.5.5.4	Uji Normalitas	54
3.5.6.	Uji Hipotesis	55
3.5.6.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	56
3.5.6.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)..	56
3.5.6.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	58
4.2	Analisis Data	60
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif	60
4.2.2.	Hasil Uji Reliabilitas	61
4.2.3.	Hasil Uji Validitas.....	62

4.2.4. Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.2.4.1 Hasil Uji Multikolinieritas	63
4.2.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
4.2.4.3 Hasil Uji Normalitas	65
4.2.5. Analisis Regresi	67
4.2.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68
4.2.5.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	69
4.2.5.3 Hasil Uji Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	69
4.2.6. Hasil Pengujian Hipotesis	71
4.2.6.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	71
4.2.6.2 Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Penggu- naan Informasi Keuangan Daerah	72
4.3 Pembahasan	72
4.3.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1)	72
4.3.2 Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2).....	75
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Implikasi	77
5.3 Keterbatasan.....	78

5.4 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Respon	51
Tabel 4.1 Tingkat Respon	59
Tabel 4.2 Demografi Responden	59
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	63
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	44
Grafik 4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas - <i>Scatterplot</i>	65
Grafik 4.2	Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram	66
Grafik 4.3	Hasil Uji Normalitas – Grafik Normal Plot.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Hasil Uji Reliabilitas	85
Lampiran B Hasil Uji Validitas	86
Lampiran C Statistik Deskriptif.....	88
Lampiran D Hasil Uji Asumsi Klasik.....	89
Lampiran E Regresi dan Uji Signifikansi	92
Lampiran F Biodata Responden & pertanyaan Kuisisioner	94
Lampiran G Surat Ijin Penelitian.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut (Safitri, 2009).

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Menurut Mardiasmo (2002) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah dan antar daerah (Mardiasmo, 2002). Pendanaan pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif (Kawedar, 2008).

Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah

dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, Haryanto (2007) dalam Rohman (2009). Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Wilson dan Kattelus (2002) dalam Rohman (2009). Akuntabilitas publik pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik (*periodic reports*), laporan keuangan interim (*interim financial reports*), dan laporan keuangan tahunan (*annual financial reports*). Dari ketiga laporan keuangan tersebut, yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakses publik adalah laporan keuangan tahunan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi

keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002).

Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan

sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (*financial accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntabilitas hukum (*legal accountability*), akuntabilitas politik (*political accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002).

Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BPK, 2008). Hal ini disesalkan karena buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Isu rendahnya transparansi dan akuntabilitas semakin dipertegas dengan adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yang menyatakan bahwa mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk Kompas (2008) dalam Rohman (2009). Pernyataan tersebut didasarkan pada kembalinya BPK memberikan opini tidak memberikan

pendapat (disclaimer) atas mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2007. Penilaian yang buruk ini juga diberikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat. Bahkan selama empat tahun berturut-turut, sampai tahun 2007, opini disclaimer ini diberikan untuk laporan keuangan pemerintah pusat. Alasan masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai buruk dalam melaporkan keuangannya, karena belum adanya UU yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara rinci. Kepala BPK, Anwar Nasution menegaskan pemerintah daerah yang mendapatkan opini buruk dalam laporan keuangannya harus memperbaiki dan membenahi berbagai kelemahannya (BPK, 2008).

Oleh karena itu diperlukan perbaikan sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan cara (SwadayaMandiri, 2008):

1. Pemerintah daerah menandatangani management representative letter dalam setiap pemeriksaan BPK RI untuk menunjukkan komitmen dan tanggungjawabnya terhadap upaya perbaikan sistem keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah menentukan kapan mencapai opini wajar tanpa pengecualian dengan menyusun action plan yang memuat apa yang harus dilakukan, aspek atau bidang apa yang perlu diperbaiki, bagaimana caranya, siapa yang melaksanakannya dan kapan atau jadwal kegiatannya.
3. Depdagri, Depkeu, dan Departemenn teknis berkoordinasi untuk menyusun suatu desain yang jelas dalam melaksanakan paket tiga UU keuangan Negara tahun 2003-2004 dalam kaitannya dengan otonomi daerah untuk meniadakan

serangkaian peraturan yang tidak jelas, multitafsir, rumit, tidak stabil, dan sering berubah.

4. Pemerintah daerah menggunakan universitas setempat dan BPKP untuk memperbaiki sistem keuangan daerah dan aplikasi komputernya, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi keuangan daerah, dan menyediakan tenaga pembukuan yang terampil.
5. DPRD membentuk panitia akuntabilitas publik untuk mendorong pemerintah daerah dan menindaklanjuti temuan BPK RI untuk perbaikan sistem pengendalian intern dan percepatan pembangunan sistem keuangan daerah, termasuk penyusunan peraturan daerah terkait.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP membawa konsekuensi juga pada perubahan sistem akuntansi. Sistem akuntansi memang tidak diatur dalam SAP tetapi entitas harus merancang sistem akuntansinyasendiri yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP. Perubahan-perubahan yang ada pada sistem akuntansi itu secara wajar berpengaruh pada undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas publik.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah penting untuk diteliti mengingat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya penggunaan informasi keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam bidang pemerintahan dituntut untuk membuat laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal maupun internal. Laporan keuangan biasanya terdiri atas Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan yang disusun oleh pemerintah tidak hanya terdiri atas laporan yang bersifat finansial (keuangan) namun juga laporan yang bersifat nonfinansial. Laporan yang disusun ini harus komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Implikasi dari penyusunan laporan keuangan pemerintah yang komprehensif adalah laporan keuangan yang disusun bersifat transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan (daerah dan pusat). Salah satu

prasyarat untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dan bagaimana informasi tersebut bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan daerah, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Untuk merealisasikan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, perlu dibangun sistem informasi keuangan daerah yang mampu dipergunakan dengan baik oleh mereka yang membutuhkan informasi tersebut (Safitri, 2009).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah (pusat dan daerah) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengguna laporan keuangan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi laporan keuangan tersebut. Pemberlakuan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti PP No 105 tahun 2000 yang mewajibkan penyampaian pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan menjadikan pemerintah harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan tersebut. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi beberapa pemerintah daerah karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif kearah tersebut (Halim (2002) dalam Mulyana (2006).

Menurut Jones et al. (1985) dalam Stecollini (2002), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel berimbas pada ketertarikan pengguna informasi keuangan daerah untuk memanfaatkan informasi yang ada secara optimal. Maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap manfaat informasi keuangan daerah.
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap manfaat informasi keuangan daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Studi ini mengambil dasar dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang mengkhhususkan pada sub studi keuangan daerah, yang bertujuan untuk mengkaji kebijakan pengungkapan laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan masalah ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengkaji dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah
2. Mengkaji dan menjelaskan pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan daerah sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik.
3. Bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang berupa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori, bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.
- BAB III Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.
- BAB IV Berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB V Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan Teori menjabarkan teor-teori relevan yang mendukung penelitian. Teori-teori tersebut inilah yang akan mendukung kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis dan menganalisis hasil penelitian.

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Subaweh, 2008).

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli, 2001).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku opportunistic (Subaweh, 2008). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (self interest) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self interst-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko (risk averse) (Herawati dan Baridwan, 2007 dalam Safitri 2009). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (stakeholders). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan

bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.1.2. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD)

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002). Berdasarkan Deniski (1973) yang dikutip dalam Sujana (2002), yang dikenal dengan Impossibility Theory bahwa banyak jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermacam kepentingan, oleh karena itu sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua jenis pengguna.

Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship).
2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara rinci tujuannya yaitu:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan organisasional.

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Namun kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dapat diringkas sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan penggunaan yang diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, dan mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantuperencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pemda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan.

2.1.2.1 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumennya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development, January 1997*”, memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yaitu: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability* serta *strategic vision*. Pemberlakuan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah kemudian menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat perwujudan *good governance* (Ulum, 2004).

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu (BPKP, 2006): (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling

berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Transparansi adalah *memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan* (SAP, 2005). Menurut Mardiasmo (2005) Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan pryeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu.

Kaitannya dengan transparansi, masyarakat (publik) mempunyai hak terhadap pemerintah yaitu (Mardiasmo, 2002):

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu:
 - a. Mengetahui kebijakan pemerintah.
 - b. Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.
 - c. Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.

2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2000). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *Top Secret*, *Secret*, *Confidential* dan *Restricted*, dan Official Secrets Acts membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan Shende dan Bennet (2004) dalam Mulyana (2006).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003).

Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa

akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

...Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purposes for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a "right to know," a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government's duty to be publicly accountable in a democratic society. (par. 56).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Concepts Statement No. 1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Mohamad dkk. (2004) dalam Mulyana (2006) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry*. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (1997) dalam Mulyana (2006) menjelaskan bahwa

kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Menurut *Governmental accounting Standard Board (GASB, 1998)* tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik;
2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Berdasarkan pada *Impossibility Theory* (Deniski, 1973 dalam Sujana, 2002), bahwa sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua kelompok pengguna yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Oleh karena itu Wilson and Kattelus (2002) dalam Rohman (2009) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan harus:

1. Menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dana dan aktivitas dari unit pemerintah sesuai dengan GAAP, dan
2. Menentukan dan membuktikan kesesuaian dengan peraturan keuangan yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

1. Masyarakat
2. para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan pemerintah

Sementara itu, bila dilihat dari jenis laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah sampai saat ini telah mengalami dua perkembangan. Perkembangan pertama, di dalam PP No. 105 tahun 2000 (Pasal 38) sebagaimana ditindaklanjuti dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 (Pasal 81) laporan keuangan yang harus disajikan secara lengkap pada akhir tahun oleh kepala daerah terdiri dari:

1. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Laporan Aliran Kas; dan
4. Neraca Daerah.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya-tidaknya meliputi:

1. Laporan Realisasi APBD;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

2.1.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005) tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi Anggaran Untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (PP No. 24 Tahun 2005). Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran minimal pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/ SIKPA)

Informasi-informasi yang disediakan oleh Laporan Realisasi Anggaran adalah mengenai informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan (PP No. 24 Tahun 2005) :

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Neraca Daerah

Penyajian laporan keuangan berupa neraca adalah penting, sebab pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang,

pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Diamond, 2002 dalam Mulyana, 2006). Di samping itu, seiring dengan tuntutan yang dikehendaki dalam PP No. 11 tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, neraca pembukaan (neraca yang pertama kali dibuat) menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Sebab, bila sistem informasi keuangan daerah (SIKD) ingin menghasilkan laporan keuangan secara lengkap pada akhir tahun, maka perlu terlebih dahulu disusun neraca pembukaan (*opening balance*). Apabila hal ini tidak segera diantisipasi oleh pemerintah daerah, maka bukan tidak mungkin reformasi dalam keuangan daerah menjadi terkesan lamban dan mandul (Halim, 2002).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 43, (PP No. 24 tahun 2005) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Manfaat informasi keuangan yang terkandung di dalam neraca adalah (Diamond, 2002 dalam Mulyana, 2006):

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola;
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang,

pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Sebaliknya, dengan tidak adanya informasi seperti yang dilaporkan dalam neraca akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh dari transaksi keuangan pada pemerintah daerah dalam suatu periode tidak tercermin secara penuh, misalnya tidak ada pelaporan mengenai piutang pajak, saldo aktiva persediaan, aktiva dalam konstruksi, kewajiban saat ini untuk menyerahkan (membayar) sejumlah uang atau barang di masa yang akan datang, dsb.
2. Akuntabilitas terbatas pada penerimaan dan penggunaan kas dan mengabaikan transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan aset dan utang;
3. Tidak memfasilitasi penilaian posisi keuangan karena tidak menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Informasi yang dibutuhkan tidak memadai untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

2.1.3.3 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk kas dan keluar yang terjadi selama periode anggaran, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti :

1. Bagaimana pemerintah daerah memperoleh sumber dana kas dan bagaimana menggunakan sumber dana tersebut.
2. Darimana pemerintah daerah mendapatkan pinjaman dan bagaimana kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi likuiditas pemerintah daerah, yaitu kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo atau yang harus segera dilunasi.

Financial Accounting Standard Board (FASB), yaitu pernyataan No.95 memberikan definisi Laporan Arus Kas sebagai berikut :

Laporan Arus Kas merupakan suatu laporan keuangan yang menunjukkan atau menggambarkan arus masuk kas dan arus keluar kas, dan perubahan bersih dalam kas yang berasal dari kegiatan operasi, kegiatan investasi (dalam SAKD dibatasi pada aktivitas transaksi aktiva tetap dan aset lainnya) dan kegiatan pembiayaan dari suatu entitas selama periode akuntansi tertentu (dalam SAKD adalah tahun anggaran). Dan laporan ini juga merupakan suatu media yang dapat menelusuri atau mencocokkan saldo awal kas dengan saldo kas pada akhir tahun anggaran.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, pengertian Laporan Arus Kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui Laporan Arus Kas

yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi. Manfaat informasi Laporan Arus Kas menurut PP No 24 Tahun 2005 adalah:

1. Sebagai indikator terhadap jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
2. Alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, Laporan Arus Kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

2.1.3.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Laporan keuangan yang telah disusun dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pembaca laporan keuangan tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya (PP No. 24 Tahun 2005). Selain itu dalam SAP dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley *et al*, 1990, dalam rohman, 2009).

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD) (Kawedar, 2008).

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Informasi yang dimuat di

dalam SIKD tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102, UU No. 33 tahun 2004, mencakup:

1. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
2. neraca daerah;
3. laporan arus kas;
4. catatan atas laporan keuangan daerah;
5. dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
6. laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
7. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian tentang transparansi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas serta transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa diantaranya yang diajukan acuan adalah:

1. Collins et al (1991) yang melakukan penelitian tentang akses pihak eksternal terhadap informasi keuangan yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti adanya pihak eksternal yang dapat memiliki akses terhadap informasi keuangan pemerintah. Hal ini merupakan gambaran nyata yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum menjadi public good. Kemudian hasil penelitian tersebut dijadikan dasar teori oleh Tayib (1994) dalam Yuliarti (2003) yang melakukan penelitian tentang akses pengguna laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Tayib (1994) dalam Yuliarti (2003) menunjukkan bahwa ada keterbatasan akses pelaporan keuangan, misalnya laporan yang dibuat hanya aksesibel untuk

kalangan konsultan dan auditor, sedangkan masyarakat sebagai pemilik dana publik sama sekali tidak memiliki akses. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan belum tercapai dengan baik.

2. Priest et al (1999) melakukan survey kepada pengguna actual dan potensial atas laporan keuangan pemerintah daerah. Survey ini dilakukannya dengan obyek pemerintah daerah di Western Australia. Hasil dari survey pengguna actual dan potensial atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan, ditemukan sekitar 15% dari respondennya mengaku tidak tertarik bahkan cenderung untuk tidak peduli dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan 50% dari responden lainnya mengindikasikan bahwa mereka tidak membaca laporan keuangan karena menilai laporan keuangan tersebut tidak aksesibel.
3. Steccolini (2002) melakukan penelitian tentang hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitaas. Steccolini mangambil sampel penelitian dari sejumlah pemerintah daerah di italia. Analisis dari hasil penelitian tentang hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas adalah bahwa laporan tahunan digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan laporan keuangan tersebut belum tentu dibaca oleh pengguna internal itu sendiri. Laporan keuangan tersebut juga tidak memegang peran yang penting dalam pengkomunikasian kepada pengguna eksternal. Sehingga dalam penelitian ini didapatkan realita bahwa pemda-pemda di

Italia tidak memenuhi peranan laporan keuangan actual dan derajat akuntabilitas.

4. Yuliarti (2003) telah melakukan penelitian tentang kebutuhan dan permintaan stakeholders akan informasi pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggali lebih dalam dan mengidentifikasi mengenai hal-hal penting yang diinginkan oleh stakeholders sehubungan dengan pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya dari laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian tentang kebutuhan dan permintaan stakeholder akan informasi pelaporan keuangan pemerintah antara lain, stakeholders membutuhkan informasi yang terklarifikasi dengan baik ke dalam aktiva dan pasiva, abgi stakeholders seperti pengamat ekonomi dan badan eksekutif pemerintah membutuhkan informasi daftar hutang dan rincian pembayarannya.
5. Anondo (2004) melakukan penelitian yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Salah satu hasil dari penelitian tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas publik adalah menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, laporan keuangan merupakan tujuan utama bagi terciptanya akuntabilitas publik.

6. Budi Mulyana (2002) melakukan penelitian untuk menguji penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Mulyana (2002) menganggap bahwa neraca daerah adalah komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berlangsung. Dan penyajian laporan keuangan ini harus transparan dan aksesibel bagi berbagai pihak pengguna informasi (stakeholders) dengan alasan tujuan dari aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah adalah untuk memenuhi mandate dari rakyat. Penelitian ini dilakukan di beberapa pemerintah daerah di daerah regional provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulannya dengan kuisisioner yang disebar pada anggota legislatif sebagai pengguna primer dan masyarakat sebagai pengguna normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
7. Abdul Rohman (2009) penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan dengan metode kuisisioner. Populasi penelitian adalah pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Tegal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2)

aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

8. Safitri Amalia Safitri (2009) Penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Untuk lebih mudahnya, ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun Penelitian	Pokok Penelitian	Hasil Penelitian
Collins et al.	1991	Akses pihak eksternal terhadap informasi keuangan	Tidak terbukti adanya pihak eksternal yang dapat memiliki akses terhadap informasi keuangan pemerintah. Menunjukkan bahwa laporan keuangan

			pemerintah belum menjadi public goods.
Tayib	1994	Akses pengguna laporan	Ada keterbatasan akses pelaporan keuangan, misalnya laporan hanya aksesibel untuk konsultan auditor, sedangkan pembayar pajak sama sekali tidak mempunyai akses.
Priest et al.	1999	Pengguna actual dan potensial atas laporan keuangan pemerintah di daerah Western Australia.	Sekitar 15% dari respondennya tidak tertarik dengan laporan keuangan dan sekitar setengah dari responden penelitiannya mengindikasikan bahwa mereka tidak membacanya karena laporan tersebut tidak aksesibel.
Stecollini	2002	Hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas, apakah laporan tahunan tersebut merupakan medium untuk akuntabilitas dengan sampel penelitian di Italia.	Laporan tahunan nampaknya digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan tidak jelas apakah laporan tersebut benar dibaca/tidak. Sementara laporan tersebut tidak mempunyai peranan yang signifikan dalam

			pengkomunikasian kepada pengguna eksternal, sehingga peranan laporan keuangan actual dan derajat akuntabilitas di pemda-pemda Italia perlu dipertanyakan.
Yuliarti	2003	Kebutuhan dan permintaan stakeholders akan informasi pelaporan keuangan pemerintah	Stakeholders membutuhkan informasi yang terklasifikasi ke dalam aktiva dan pasiva, para pengamat ekonomi dan badan eksekutif pemerintah membutuhkan informasi daftar hutang dan pembayarannya
Anondo	2004	Laporan pertanggungjawaban Pemda sebagai perwujudan akuntabilitas publik	Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah kabupaten/kota
Budi Mulyana	2006	Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (studi di	Penyajian neraca daerah dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan

		Provinsi DIY)	akuntabilitas
Abdul Rohman	2009	Aksesibilitas, penyajian dan penggunaan informasi keuangan daerah. (studi di Kota dan Kabupaten Tegal)	penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
Ratna Amalia Safitri	2009	Aksesibilitas, penyajian dan penggunaan informasi keuangan daerah (Studi empiris di Kabupaten Semarang)	Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Setelah diberlakukannya desentralisasi berupa otonomi daerah, suatu lembaga pemerintah harus dapat mewujudkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkannya yaitu dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik serta aksesibilitas dari laporan keuangan daerah itu sendiri. Untuk mengetahui hasil riil dari penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan itu sendiri diperoleh dengan melihat pengaruhnya pada bagaimana informasi keuangan daerah tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna informasi laporan keuangan.

2.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik. Bagaimana penilaian tanggung jawab itu selanjutnya kita kembalikan lagi kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil *feedback* dari pengguna informasi atas penyajian laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.

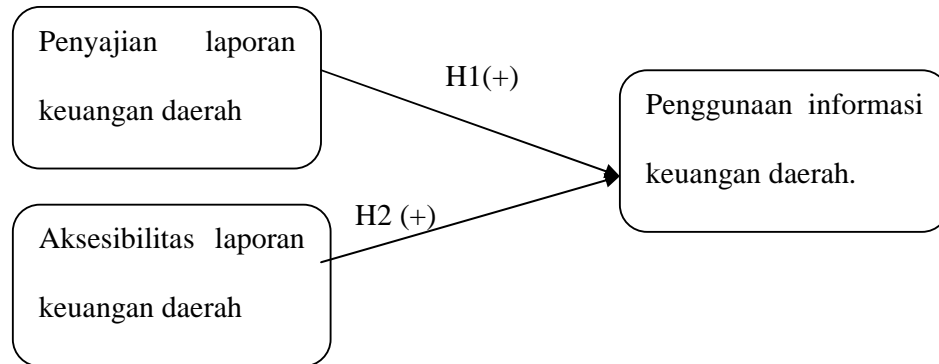
2.3.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley *et al*, 1990, dalam Rohman, 2009).

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak hanya disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibilitas pada pengguna potensial (Jones et al., 1985 dalam Mulyana 2006). Oleh karena itu, pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan paparan singkat di atas, kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian masalah dan kajian pustaka di atas, penulis menyusun dua hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran,2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penggunaan informasi keuangan daerah (PIKD).

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Informasi laporan keuangan yang berkualitas seringkali tidak diketahui oleh pengguna informasi jika mereka tidak memanfaatkan akses yang dibuka oleh pemerintah daerah. Menurut Safitri (2009) Penggunaan informasi keuangan daerah diukur dengan indikator apakah laporan keuangan itu benar-benar digunakan oleh pengguna informasi, dengan menggunakan instrumen kuesioner, dengan skala pengukuran respon 5 (lima) poin skala likert.

3.1.2 Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLK)

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah diukur menggunakan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian terdahulu oleh Budi Mulyana (2006). Pengukuran variabel penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan mengajukan 4 (empat) indikator penyajian Laporan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan Keuangan dengan skala pengukuran respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) poin skala likert.

b. Aksesibilitas laporan keuangan (ALK)

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. Aksesibilitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, menurut Safitri (2009) pengukuran variabel aksesibilitas laporan keuangan dengan 2 (dua) indikator

seputar aksesibilitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah yaitu; laporan keuangan dapat diakses dan laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum, dengan skala pengukuran respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) poin skala likert.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten se-eks Karesidenan Banyumas, yaitu anggota DPRD, pegawai Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Masyarakat. Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut:

1. Anggota DPRD adalah pengguna utama aktual laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyana, 2006). Anggota DPRD yang dipilih adalah anggota yang terlibat dalam proses pembuatan anggaran, pengesahan, hingga pertanggungjawaban laporan keuangan daerah.
2. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang sekarang berganti nama menjadi Inspektorat daerah, dipilih karena mereka bertanggungjawab untuk meyakinkan bahwa penggunaan uang daerah telah dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku (Ulum, 2004). Inspektorat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Pegawai inspektorat daerah yang dipilih adalah pegawai yang

pernah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pernah ditugaskan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

3. Masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintah merupakan pengguna potensial laporan keuangan pemerintah daerah. Masyarakat memiliki rentang variabilitas pemahaman dan kepedulian akan laporan keuangan yang sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam menilai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan agar mereka dapat menilai kinerja pemerintah, memberi respon atau koreksi apabila ternyata laporan keuangan pemerintah menunjukkan ketidakefektivan kinerja pemerintah. Namun, hanya sedikit dari anggota masyarakat yang melihat dan mampu menginterpretasikan laporan tahunan pemerintah daerah tersebut. Sehingga untuk meningkatkan kualitas data akan dipilih individu-individu atau kelompok yang representatif mewakili masyarakat yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM yang dipilih adalah LSM yang anggotanya pernah menyoroti proses penganggaran, penyajian laporan keuangan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah di wilayah Eks Karesidenan Banyumas (Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Cilacap).
4. Untuk meningkatkan obyektivitas persepsi, pihak penyaji laporan keuangan yaitu pihak pemerintah daerah itu sendiri (eksekutif): kepala daerah dan para kepala satuan kerja (dinas, badan, kantor) tidak termasuk sebagai responden.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari responden yang penulis gunakan, yaitu anggota DPRD, pegawai Bawasda dan pembayar pajak badan yang berada di lingkungan eks Karesidenan Banyumas. Melalui cara ini, peneliti memutuskan untuk terjun sendiri dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk mendapatkan data yang relevan dan riil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara dengan melakukan pengelolaan kuesioner untuk mendapatkan data. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, bentuk pertanyaan dalam kuesioner bersifat *closed-ended questions* untuk memudahkan dalam pengukuran respon dari responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survey dengan mendistribusikan kuisisioner terhadap pengguna laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan eks Karesidenan Banyumas. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti membuat rumusan pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian data akan didapat dari jawaban atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh responden terpilih. Metode ini dipilih oleh peneliti karena kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien karena peneliti dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel yang digunakan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Lembar kuisisioner diserahkan kepada semua responden yang dimaksud yaitu Anggota DPRD, Pegawai Inspektorat Daerah, dan anggota LSM.
2. Setelah 1 (satu) minggu sejak lembar kuisisioner tersebut diserahkan, peneliti mengumpulkan lembar kuisisioner yang telah diisi responden.
3. Jika ada responden yang belum mengembalikan lembar kuisisioner, maka diberi waktu 1 (satu) minggu lagi

Setelah batas waktu yang ditentukan dan lembar kuisisioner tersebut telah terkumpul maka peneliti melakukan penyortiran terhadap lembar kuisisioner yang dapat digunakan dan lembar kuisisioner yang tidak dapat digunakan. Jika lembar kuisisioner yang dapat digunakan mencapai 30 lembar kuisisioner maka peneliti akan langsung mengolah data. Namun, jika lembar kuisisioner yang dapat digunakan belum mencapai 30 lembar maka akan dicoba lagi untuk mengirimkan lembar kuisisioner kepada responden yang belum mengembalikan lembar kuisisioner tersebut.

Skala pengukuran respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) poin dengan skala Likert dengan lima pilihan jawaban. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini mendapat pengaruh dari instrumen yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Budi Muyana (2006). Pada penelitian ini, peneliti mengambil wilayah studi empiris di eks Karesidenan Banyumas. Berikut skala pengukuran respon ditunjukkan pada tabel.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Respon

Tipe skala	Kontinum Skala Poin (5 poin)				
	5	4	3	2	1
Persetujuan (skala Likert)	Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Tidak Tahu (TT)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: data primer yang diolah, 2011

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Tingkat Respon

Tingkat respon adalah proporsi dari sampel yang melengkapi kuesioner. Jumlah kuesioner yang dikirim, yang berhasil kembali, sampai pada jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk diolah harus dicatat dan dikelompokkan, kemudian dihitung proporsi secara keseluruhannya. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji reliabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik (meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas) (Mulyana, 2006).

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2005). Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data terhadap rata-ratanya (*mean*). Apabila standar deviasinya

kecil, berarti nilai sampel atau populasinya mengelompok di sekitar rata-rata hitungnya.

3.5.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2005). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja.

Pengukuran *one Shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 (Nunnally, 1967).

3.5.4 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2005). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

3.5.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai-nilai korelasi antar variabel bebas = 0.

Dalam penelitian ini, gejala multikolinieritas dilihat dari: (1) nilai *Tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor (VIF)*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah = mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1, dan mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah = nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1$ atau *Tolerance*) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah *Tolerance* 0,10 atau = nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2005).

3.5.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Karena penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam satu periode saja, maka uji autokorelasi tidak diperlukan dalam penelitian ini.

3.5.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, sumbu x adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Dasar analisis (Ghozali, 2005):

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika telah ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.5.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan *plotting* data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005).

3.5.6 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

X₁ : Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

a : Konstanta

- b_1 : slope regresi atau koefisien regresi dari X_1
- b_2 : slope regresi atau koefisien regresi dari X_2
- e : kesalahan residual (error term)

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 17,0 dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Analisis hasil regresi dilakukan berdasarkan sub bab berikutnya.

3.5.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila $r = +1$, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat.

3.5.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2005). Jika hasil F test diperoleh nilai F hitung lebih besar dari df dan signifikansi jauh di bawah derajat kepercayaan yang ditentukan maka model regresi dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Signifikan bila $p \text{ value} < \alpha (0,05)$ sehingga menerima hipotesis.
- 2) Tidak signifikan bila $p \text{ value} > \alpha (0,05)$ sehingga menolak hipotesis.

3.5.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output SPSS.

Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Signifikan bila ρ value $< \alpha$ (0,05) sehingga menerima H_1 .
- 2) Tidak signifikan bila ρ value $> \alpha$ (0,05) sehingga menolak H_1 .